

RANCANGAN RENJA

TAHUN 2025

IN AL PELAYANAN PUBLIK
KOTA BANDA ACEH

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 tidak terlepas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang tersusun dengan memedomani Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Secara Substansi, dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Banda Aceh, 1 April 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Andri, S.STP., M.Si

Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

EXECUTIVE SUMMARYiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH20

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 20

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 20

3.3. Program dan Kegiatan..... 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH28

BAB. V PENUTUP35

EXECUTIVE SUMMARY

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang akan dijabarkan pula dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Berdasarkan RENSTRA DPMPTSP terdapat 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan yang direncanakan termuat dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Adapun Program dan Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target kinerja yakni jumlah nilai Investasi Kota Banda Aceh sebesar Rp. 630,06 Triliun, pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,76.

Rencana anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.013.580.546,-, yang terbagi kedalam 6 program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang didalamnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang Langkah – Langkah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu sebagai salah satu produk perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah strategi jangka menengah dengan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh selaku Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Dalam menyusun Rencana Kerja harus memperhatikan kesesuaian capaian output antar kegiatan dalam satu program maupun dengan program lain, selain itu harus ada keselarasan program dengan isu strategis daerah yang memuat dalam rancangan awal RKPD Kota Banda Aceh.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tahun 2025 mengacu pada dokumen – dokumen perencanaan yang sudah ada yaitun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026 dan Renstra DPMPTSP tahun 2023 – 2026 dan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP/24/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tetang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 nomor 2);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026;
24. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
25. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
26. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
27. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai VISI MISI Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 menyediakan informasi mengenai rencana kerja tahun 2025 serta sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan urusan Penanaman Modal untuk kurun waktu satu tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (RPD) tahun 2023 – 2026 sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan pada

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Banda Aceh selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

Sementara, tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dimana tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal”.

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh tahun 2025. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang targetnya telah ditetapkan didalam Renstra.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Sistematika Penulisan :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Banda Aceh

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh

4.1 Tabel Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Renja yang dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, maka Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja OPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra OPD, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Kemudian di fokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 Tanggal 3 November 2023, Maka Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP Kota Banda Aceh dari sebelumnya sebesar Rp. 8.164.818.873,- menjadi Rp. 7.992.313.742,- yang di bagi kedalam 2 (dua) pembelanjaan, yaitu:

- 1) Belanja Operasi (Belanja Pegawai & Belanja Barang dan Jasa) Rp. 7.970.259.742,-
- 2) Belanja Modal (Belanja Modala Peralatan dan Mesin) Rp. 22.054.000,-

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 s/d desember realisasi anggaran sebesar Rp, 7.841.000.711,-

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah.

Realisasi Fisik : 78.17% dan Realisasi Keuangan : 98,12% dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	4.840.935	69.01	3.340.935	69.01 -	1.500.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.955.136.552	100	4.874.079.319	98.36	81.057.233
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.795.797	100	129.624.715	97.61	3.171.082
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.054.000	100	-	-	22.054.000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.720.283.043	100	1.716.580.312	99.78	3.702.731
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.372.300	100	97.431.000	83.72	18.941.300

2. Program Promosi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 100% dan realisasi Keuangan :100 % , dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-12.303.000	100	-12.303..000	100	-

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi Fisik : 0 % dan realisasi Keuangan : 0 % , dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif	-	00,00	-	00,00	-

	Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
--	--	--	--	--	--	--

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 30 % dan realisasi Keuangan : 29,88 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu PIntu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	17,436,115	30.00	5,210,130	29,88	12,225,985

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 98.57% dan realisasi Keuangan : 97.41 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.	333,900,000	98.57	325.239.300	97.41	8.660.700

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 100% dan Realisasi Keuangan : 100 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang	677.192.000	100	677.192.000	100	0

	Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
--	---	--	--	--	--	--

1) Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut;

Terdapat 10 (Sepuluh) kegiatan pada 6 (enam) program yang belum memenuhi target Renja dan Renstra DPMPTSP, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
 - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah (69.01%)
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah {98.36%}
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (0 %)
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (99.78%)
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (83.72%)
- b. Porgram Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)
- c. Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan (29.88%)
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota (97.41%)

2) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Pereizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Daerah (100%)

3) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.

- 4) Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapainya target pada beberapa program dikarenakan capaian tahun berjalan belum selesai, dan terjadinya pengalihan anggaran pada kegiatan yang lebih strategis.

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian program Renstra yang belum sesuai, peningkatan sarana dan prasarana serta SDM untuk mendukung pelayanan secara digitalisas, tidak mempunya secara terus menerus menggali potensi investasi daerah akibat keterbatasan sumber daya, sehingga tidak menemukan potensi unggulan investasi.

- 6) Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut;

Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan kegiatan.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Banda Aceh**

Kode		Uraian/Isi dari Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Program/Rencana Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-1)		Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023 (n-1)	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (8-7/6)	(11) = (10/9)	(12)	(13)	
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN													
2	14	01	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100%		100%	100	%	
			Kebijakan					5.381.415,235					
2	14	01	1.01	100	%	100	%	100%		100%	100	%	
			Kegiatan Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan Program/Kelembagaan					-					
2	14	02	2.01	9	Dokumen	9	Dokumen	9 Dokumen		9 Dokumen	9	Dokumen	
			Sub kegiatan Peningkatan Dokumen					9 Dokumen		100%	100	%	
2	14	03	3.01	100	%	100	%	100%		100%	100	%	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Peningkatan					4.138.343,400					
2	14	02	2.02	12	Bulan	12	Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12	Bulan	
			Sub kegiatan Peningkatan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan					3.454.500,772					
2	14	02	2.02	12	Bulan	12	Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12	Bulan	
			Sub kegiatan Peningkatan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan					573.453,508					
2	14	01	1.01	100	%	100	%	100%		100%	100	%	
			Kegiatan Administrasi Peningkatan Peningkatan					-					
2	14	01	2.01	0	Struk	0	Struk	0 Struk		0 Struk	0	Struk	
			Sub kegiatan Peningkatan Peningkatan Dokumen					-					
2	14	01	2.02	100	%	100	%	100%		100%	100	%	
			Kegiatan Administrasi Urusan Peningkatan Daerah					5.175.523					
2	14	01	2.06	11	Paket	9	Paket	9 Paket		9 Paket	9	Paket	
			Sub kegiatan Peningkatan Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor yang disediakan					6.564.500					
2	14	01	2.06	6	Paket	6	Paket	6 Paket		6 Paket	6	Paket	
			Sub kegiatan Peningkatan Bahan Logistik Kantor					42.509,504					
2	14	01	2.06	13	Paket	16	Paket	16 Paket		16 Paket	16	Paket	
			Sub kegiatan Peningkatan Bangun Ruang					44.441,246					
2	14	01	2.07	10	Laporan	10	Laporan	24 Laporan		24 Laporan	24	Laporan	
			Sub kegiatan Peningkatan Ruang					-					
2	14	01	2.07	100	%	100	%	100%		100%	100	%	
			Kegiatan Peningkatan Ruang					-					
2	14	01	2.07	55	Unit	70	Unit	50 Unit		50 Unit	50	Unit	
			Sub kegiatan Peningkatan Peningkatan dan Modernisasi					-					
2	14	01	2.07	12	Unit	16	Unit	1 Unit		1 Unit	1	Unit	
			Sub kegiatan Peningkatan Peningkatan dan Modernisasi					-					
2	14	01	1.07	1	Unit	-	-	-		1 Unit	-	-	
			Sub kegiatan Peningkatan Peningkatan dan Modernisasi					-					

2	18	05		Program Pengembangan Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyertake Milik Penanaman Modal	100	%	100	%	100%		205.177,400			100%	100		%
2	18	05	2.01	Kegiatan Pengumpulan Rekrutmen Penanaman Modal yang mengadun Kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Rekrutmen Penanaman Modal	1	Laporan	100	%	100%		205.177,400			100%	100		%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanaman Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman pelaksanaan penanaman modal	10	Kegiatan Usaha	0	Kegiatan Usaha	0		-	0		-	0		0
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	15	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	224 pelaku usaha		205.097,400	0		-	0		0
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	15	Kegiatan Usaha	22	Kegiatan Usaha	22 kegiatan usaha		4.480,000	0		-	0		0
2	18	05	2.01	0004	Sub kegiatan Pemeliharaan Perencanaan dan Pembinaan yang dihadap Pelaku Usaha dalam memfasilitasi kegiatan usahanya	Jumlah Pemeliharaan perencanaan dan pembinaan yang dihadap pelaku usaha dalam memfasilitasi kegiatan usahanya	10	Kegiatan Usaha	-	-		-	-		10	Kegiatan Usaha	-	-
2	18	05	2.01	0005	Sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/koordinasi implementasi Partisipan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	250	Pelaku Usaha	-	-		-	-		250	Pelaku Usaha	-	-
2	18	05	2.01	0006	Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan pengawasan dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku disalurkan informasi laporan serta dilakukan evaluasi penulisan kegiatan pelaksanaan perizinan berusaha	30	Kegiatan Usaha	-	-		-	-		30	Kegiatan Usaha	-	-
2	18	05			Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pemertua Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	92,45	Milial	100	%	100%		111.000,000		100%	100		%
2	18	05	2.01		Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Perizinan berbasis Elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100	%	48000	Jumlah Penyejang APP	100%	111.000,000		100%	100%	100		%
18	06	2.01	01	Kegiatan Pengelolaan, Penjualan dan Pemertuaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berbasis terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan elektronik yang diolah dikaji dan dimartakan	1	Dokumen	1	Dokumen	80%		331.000,000	0		0	0		0
2	18	06	2.01	0002	Sub kegiatan Pengelolaan, Penjualan dan Pemertuaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berbasis terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan non perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan berbasis terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimartakan	1	Dokumen				-	-		1	Dokumen	-	-

Note:
 *Warna Pink adalah sub kegiatan pada Tahun 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dihitung berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah tertuang dalam Renstra DPMPTSP, dalam Peraturan WaliKota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja DPMPTSP antara lain:

1. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu pintu.
3. Menyusun peta potensi investasi Kota.
4. Menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh terdapat pada RKP yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional” dengan sasaran “Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik”. Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan Optimalisasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah. Maka dengan mengacu kepada hal tersebut, dalam Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

(Kondisi per Desember 2023)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2023		REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023		CAPAIAN TAHUN 2023
Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	90.74		93.73		103%
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 575,276,278,192.00	Milyar	Rp 573,535,555,168.00	Milyar	99.70%
Rata-Rata Persentase Realisasi							101%

Capaian jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA sampai pada triwulan keempat mencapai Rp. 136.619.739.814 triliun dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 57.539.814 triliun dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp. 136.562.200.000 triliun, dengan jumlah 830 Investor. Capaian kinerja pelayanan DPMPPTSP Kota Banda Aceh hingga Tahun 2023 yang terkait: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada semester I tahun 2023 dengan nilai Indeks 93,67 atau berada pada katagori A (Sangat Baik) dan semester II tahun 2023 dengan nilai indeks 93.80 atau berada pada katagori A (Sangat Baik). Selain itu juga, penyelenggaraan perizinan DPMPPTSP Kota Banda Aceh telah memperoleh penghargaan dari Kementerian PAN & RB yaitu Predikat A untuk unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah Tahun 2022. Terkait dengan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 mendapat nilai B, Nilai ini tentunya masih jauh dari target yang ingin dicapai. Namun pada tahun 2023 capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendapat nilai BB. Melalui capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan DPMPPTSP Kota Banda Aceh pada masa yang akan datang.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2025)	Tahun (2026)		
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			90.74	90.75	90.76	90.77	92.29	93.73	90.76	90.77		
2	Realisasi Nilai Investasi Berskala Nilai PMDN/PMA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			575.27 Milyar	602.67 Milyar	630.06 Milyar	657.45 Milyar	433.87 Milyar	575.27 Milyar	630.06 Milyar	657.45 Milyar		
3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			CC	CC	B	B	B	-	B	B		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan. Dalam rangka peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik melalui penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan OSS selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi khususnya di Kota Banda Aceh dan provinsi Aceh.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah daerah terkait sistem OSS baik dalam regulasi maupun sistemnya. Adapun beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan antara lain:

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan terkait dengan kelembagaan PTSP di daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi pelayanan perizinan. Hal ini karena adanya beberapa NSPK sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 dalam mekanisme pelayanannya tidak mewajibkan prosesnya melalui DPMPTSP tetapi langsung melalui perangkat daerah teknis

2. Mendorong kejelasan, kepastian dan harmonisasi kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem OSS, baik regulasi maupun sistemnya secara konsisten tidak selalu berubah-ubah;
3. Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan daerah dalam mewujudkan kebijakan pelayanan perizinan baik berupa NSPK ataupun rencana penerbitan omnibuslaw yang sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan optimalisasi dan sinkronisasi peran perencanaan dan pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah dalam bentuk program dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi penanaman modal di daerah dapat dioptimalkan dengan baik.
5. Perlunya fasilitas pelaksanaan Alokasi dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani Perizinan dan Non Perizinan terlatih, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2019 – 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2019 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Rencana kerja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh 2023 - 2026. Mengacu kepada Renstra ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh selama lima tahun mendatang yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”, serta “Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal” Sementara itu, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026 yaitu:

1. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal; dan
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal.

Adapun sasaran strategi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dituangkan dalam dokumen Rancangan Kerja (Renja) Tahun 2023 – 2026.

Sasaran 1 : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Maka Indikator sasaran DPMPTSP dalam mendukung rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
2. Pertumbuhan Ekonomi.

3.3. Program dan Kegiatan.

Program merupakan Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan dalam Renja DPMPTSP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pencapaian Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 tidak terlepas dari memperkuat Tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh mengalami perlambatan dari 6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami perlambatan kembali tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemic Covid-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Strategi peningkatan perekonomian Kota Banda Aceh salah satunya dengan Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

b) Pencapaian SDG's

Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan Internasional dimasa mendatang, dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dipromosikan sebagai tujuan Global untuk pembangunan yang berkelanjutan. SDG's menggantikan MDG's (Tujuan Pembangunan Milenium) yang tidak laju berlaku terhitung mulai akhir 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga 2030.

Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam pencapaian SDG's yaitu :

- Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan dan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha yang terintegritas secara elektronik: Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan bagi para pelaku usaha melalui kegiatan kunjungan lapangan. Bimtek Implementasi pembinaan perizinan berusaha berbasis resiko dan Bimtek Implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko serta kegiatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
 - Terjadinya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua., Ditandai dengan jumlah Investor PMDN/PMA tahun 2023 (kondisi TW IV) sebanyak 3.526 investor. Dengan nilai realisasi investasi sebanyak Rp. 573.535.555.168 triliun.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memiliki tupoksi didalam pencapaian kinerja di bidang Penanaman Modal dan perizinan, program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2025, yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah.
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.

- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 1.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - 2.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanamanm Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan.
 - 2.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - 2.2.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal.
 - 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - 1.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 3.4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3.4.1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
 - 3.4.2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
 - 3.4.3. Pengawasan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 6.1.1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kegiatan lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2025 banyak dilaksanakan di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan di beberapa tempat di Kota Banda Aceh. Total Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 6 program, 13 kegiatan, dan 30 sub kegiatan, Dengan rencana total jumlah pagu indikatif 2025 mencapai Rp. 12.013.580.546.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(10)	(7)	(8)	(9)		(10)
					Urusan Pemerintahan umum yang tidak berkaitan dengan pemerintahan Daerah										
2	18				SPKPD					22,828,968,846					22,828,968,846
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	10,453,509,586	PAD		100	%	10,453,509,586
2	18	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	7,396,800	PAD		100	%	7,396,800
2	18	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	5	Dokumen	Rp 7,396,800	PAD		9	Dokumen	Rp 7,396,800
2	18	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	5,705,562,085	DAU-PAD		100	%	5,705,562,085
2	18	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	32	Orang/ Bulan	4,888,302,085	DAU		32	Orang/Bulan	4,888,302,085
2	18	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Dokumen	817,260,000	DAU-PAD		12	Dokumen	817,260,000
2	18	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	56,200,000	PAD		100	%	56,200,000
2	18	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakalan dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	56	Paket	56,200,000	PAD		50	Paket	56,200,000
2	18	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	408,456,305	PAD		100	%	408,456,305
2	18	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Paket	11,542,000	PAD		12	Paket	11,542,000
2	18	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	7	Paket	5,295,000	PAD		7	Paket	5,295,000
2	18	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Paket	41,619,305	PAD		12	Paket	41,619,305
2	18	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	10	Laporan	350,000,000	PAD		10	Laporan	350,000,000

2	18	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	100	%	517,128,000	PAD		100	%	517,128,000
2	18	01	1.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	1	Unit	-	-	-	1	Unit	-
2	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	50	Unit	517,128,000	PAD		50	Unit	517,128,000
2	18	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	1	Unit	-	PAD		1	Unit	-
2	18	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	100	%	1,648,736,061	PAD		100	%	1,648,736,061
2	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	12	Laporan	1,364,150,000	PAD		12	Laporan	1,364,150,000
2	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	12	Laporan	284,586,061	PAD		12	Laporan	284,586,061
2	18	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	100	%	2,110,090,335	PAD		100	%	2,110,090,335
2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	7	Unit	59,136,000	PAD		7	Unit	59,136,000
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	59	Unit	169,294,335	PAD		59	Unit	169,294,335
2	18	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Banda Aceh, Balturrehman, Kampung Baro	2	Unit	1,881,600,000	PAD		2	Unit	1,881,600,000
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	775,235,000	PAD		100	%	775,235,000
2	18	02	2.01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	656,625,000	PAD		100	%	656,625,000
2	18	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	299,305,000	PAD		1	Dokumen	299,305,000
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan Kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah.	Kota Banda Aceh	50	Dokumen	357,320,000	PAD		50	Dokumen	357,320,000
2	18	02	2.02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	118,610,000	PAD		100	%	118,610,000
2	18	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	-	PAD		1	Dokumen	-
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi Investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi Investasi	Kota Banda Aceh	1	Daerah	118,610,000	PAD		1	Daerah	118,610,000
2	18	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	-	PAD		1	Dokumen	-
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	271,530,000	PAD		100	%	271,530,000
2	18	03	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Laporan	271,530,000	PAD		100	%	271,530,000
2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	271,530,000	PAD		1	Dokumen	271,530,000
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	-	PAD		1	Dokumen	-

2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Kota Banda Aceh	100	%	80,685,960	PAD		100	%	80,685,960
2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	2	Laporan	80,685,960	PAD		100	%	80,685,960
2	18	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Banda Aceh	2500	Pelaku Usaha	22,685,960	PAD		2500	Pelaku Usaha	22,685,960
2	18	04	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Banda Aceh	500	pelaku usaha	-	PAD		500	pelaku usaha	-
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kota Banda Aceh	80	Kegiatan Usaha	58,000,000	PAD		80	Kegiatan Usaha	58,000,000
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	370,000,000	DAK		100	%	370,000,000
2	18	05	2.01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	370,000,000	DAK		100	%	370,000,000
2	18	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kota Banda Aceh	10	Kegiatan Usaha	10,040,000	DAK		10	Kegiatan Usaha	10,040,000
2	18	05	2.01	0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Banda Aceh	250	Pelaku Usaha	-	DAK		250	Pelaku Usaha	-
2	18	05	2.01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kota Banda Aceh	30	Kegiatan Usaha	359,960,000	DAK		30	Kegiatan Usaha	359,960,000
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	62,620,000	PAD		100	%	62,620,000
2	18	06	2.01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kota Banda Aceh	100	%	62,620,000	PAD		100	%	62,620,000
2	18	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah data dan informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	62,620,000	PAD		1	Dokumen	62,620,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 -2026, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh dan Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2023. Mengacu pada dokumen tersebut DPMPTSP Kota Banda Aceh telah merumuskan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu”, dengan sasaran Optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan pada penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan tujuan “Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal” dengan sasaran jangka menengah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

1. Program

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun kegiatan unggulan/prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2025, antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 3) Program Promosi Penanaman Modal;

- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 6) Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

2. Kegiatan.

Sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan beberapa kegiatan untuk menunjang program – program yang telah ada. Untuk merealisasikan program – program diatas, ditetapkan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 8) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 11) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 12) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 13) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 14) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut atau penerjemahan dari aktivitas atau layanan kegiatan di dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan kegiatan – kegiatan diatas, ditetapkan sub kegiatan – sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 11) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 14) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 15) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 16) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 17) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 18) Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- 19) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 20) Sub Kegiatan Pemutahiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
- 21) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 22) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 23) Sub Kegiatan Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

- 24) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- 25) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 26) Sub Kegiatan Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko
- 27) Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- 28) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- 29) Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
- 30) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 4.1

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Page	Kelompok Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	18	Sub Kegiatan Pengadaan barang, jasa yang tidak terdapat dalam daftar pengadaan barang, jasa pemerintah						
2	18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	100	%	10,452,609,886	DPWP-TSP
2	18	01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	100	%	7,396,800	DPWP-TSP
2	18	01 2.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	5	Dokumen	7,396,800	DPWP-TSP
2	18	01 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	100	%	5,705,662,068	Pegawai DPWP-TSP
2	18	01 2.02 Sub Kegiatan Penyediaan Sal. dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	32	Orang/ Bulan	4,888,302,083	Pegawai DPWP-TSP
2	18	01 2.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	12	Dokumen	817,260,000	Pegawai DPWP-TSP
2	18	01 2.05 Kegiatan Administrasi Kepala/wakil Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepala/wakil Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	100	%	96,300,000	Pegawai DPWP-TSP
2	18	01 2.05 Sub Kegiatan Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah paket Pakian dinas beserta atribut kelembagaan	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	56	Paket	56,200,000	Pegawai DPWP-TSP
2	18	01 2.05 Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	100	%	408,456,308	DPWP-TSP
2	18	01 2.06 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	12	Paket	11,542,000	DPWP-TSP
2	18	01 2.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	7	Paket	5,295,000	Pegawai DPWP-TSP
2	18	01 2.06 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	12	Paket	41,619,305	DPWP-TSP
2	18	01 2.06 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	10	Laporan	350,000,000	DPWP-TSP
2	18	03 2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	100	%	817,138,000	DPWP-TSP
2	18	01 1.07 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	1	Unit		DPWP-TSP
2	18	01 2.07 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	50	Unit	517,128,000	DPWP-TSP
2	18	01 2.07 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	1	Unit		DPWP-TSP
2	18	01 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	100	%	2,484,756,083	DPWP-TSP
2	18	01 2.08 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	12	Laporan	1,394,150,000	DPWP-TSP
2	18	01 2.08 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bera	12	Laporan	294,586,061	DPWP-TSP

2	18	01	2.08		Kegiatan pemeliharaan Bangk Millik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	Perentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Bangk Millik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Samudra, Kempong Baro	100	%	2.110.080,838	DPMPITSP
2	18	01	2.09		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Perbaikan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Labengin	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapeng yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kempong Baro	7	Unit	59.136.000	DPMPITSP
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Beralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kempong Baro	59	Unit	169.206.335	DPMPITSP
2	18	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kempong Baro	2	Unit	1.861.600.000	DPMPITSP
2	18	02			Program Pengembangan Ilmu Penannaman Model	Perentase Pengembangan Ilmu Penannaman Model	Kota Banda Aceh	100	%	773.235.000	DPMPITSP
2	18	02	2.01		Kegiatan Penanngan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penannaman Model yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penannaman Model	Kota Banda Aceh	100	%	666.625.000	DPMPITSP
2	18	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penannaman Model	Jumlah Peraturan Daerah/Provinal dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penannaman Model	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	299.305.000	DPMPITSP
2	18	02	2.01	0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan Kemitraan antara usaha besar (PMDA/PMDN) dengan UMKW di daerah.	Kota Banda Aceh	50	Dokumen	357.320.000	Investor
2	18	02	2.02		Kegiatan penumbuhan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Perentase Kabupaten/Kota Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	100	%	116.610.000	DPMPITSP
2	18	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penannaman Model Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana umum Penannaman Model Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	-	DPMPITSP
2	18	02	2.02	0003	Pemutihan data potensi (investasi daerah pada sistem PIR (potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutihan data potensi investasi	Kota Banda Aceh	1	Daerah	116.610.000	DPMPITSP
2	18	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	-	DPMPITSP
2	18	03			Program Promosi Penannaman Model	Perentase Promosi Penannaman Model	Kota Banda Aceh	100	%	271.590.000	DPMPITSP
2	18	03	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penannaman Model yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Perentase Penyelenggaraan Promosi Penannaman Model	Kota Banda Aceh	1	Laporan	371.690.000	DPMPITSP
2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penannaman Model Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan (Promosi) Penannaman Model Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	271.590.000	Pelaku Usaha
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan strategi Promosi Penannaman Model Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen strategi Promosi Penannaman Model Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	-	DPMPITSP
2	18	04			Program Pelayanan Penannaman Model	Perentase Tingkat kepuasan Masyarakat	Kota Banda Aceh	100	%	80.668.960	DPMPITSP
2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Perlinan dan Non Perlinan secara Terpadu satu pintu di Bidang Penannaman Model yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meilinkannya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Banda Aceh	2	Laporan	80.668.960	DPMPITSP
2	18	04	2.01		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perlinan Berusaha melalui Sistem Perlinan berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perlinan berbasis melalui sistem perlinan berbasis berotasi risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Banda Aceh	2500	Pelaku Usaha	22.686.960	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengediaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perlinan Berusaha Berotasi Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perlinan berusaha melalui sistem elektronik berotasi risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Banda Aceh	500	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	0008	Pemenuhan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perlinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemenuhan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perlinan berusaha berbasis risiko lntas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kota Banda Aceh	80	Kegiatan Usaha	58.000.000	

2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	370,000,000	DPMP/TSP
2	18	05	2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	370,000,000	DPMP/TSP
2	18	05	2.01	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kota Banda Aceh	10	Kegiatan Usaha	10,000,000	Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Banda Aceh	250	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perzinan berusaha	Kota Banda Aceh	30	Kegiatan Usaha	359,960,000	Pelaku Usaha
2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	62,620,000	DPMP/TSP
2	18	06	2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	62,620,000	DPMP/TSP
2	18	06	2.01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	62,620,000	DPMP/TSP

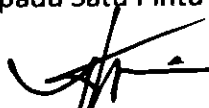
BAB. V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan Pembangunan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal untuk mendukung arah Pembangunan Daerah, selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan strategis daerah Kota Banda Aceh. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka seluruh Bidang dan Sekretariat pada DPMPTSP Kota Banda Aceh, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBK Tahun 2025, Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Guna menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Banda Aceh, 1 April 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Andri, S.STP., M.Si
Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002